

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu pilar utama dari demokrasi. Di Indonesia demokrasi mengandung arti bahwa yang menjalankan kedaulatan adalah wakil-wakil rakyat yang ditentukan sendiri oleh rakyat. Untuk menentukan siapa yang berwenang mewakili rakyat, mekanisme yang diatur oleh konstitusi adalah melalui Pemilu. Melalui pemilihan umum dipilihlah wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik. Dalam Pemilu diharapkan wakil-wakil rakyat yang dipilih benar-benar mewakili aspirasi, keragaman, kondisi serta keinginan dari rakyat yang memilihnya.

Sebelum reformasi, menurut Gaffar bahwa proses politik di bawah Orde Baru bukanlah demokrasi, karena Pemilihan Umum (Pemilu) hanya bertujuan memperoleh legitimasi pemerintah untuk menata irama politik dan ekonomi. Sementara itu, Irawan dan Indriana menyatakan bahwa beberapa pelaksanaan pemilu ditandai dengan terjadinya penyimpangan, sehingga asas LUBER tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pernyataan yang sama dinyatakan oleh Samego bahwa pada penyelenggaraan Pemilu Orde Baru, pemerintah pusat terlalu dominan dan tidak netral. Setelah Pemilu, partai-partai politik tidak dapat menjalankan fungsinya secara maksimal karena eksistensinya tidak mandiri dan tidak independent.

Kondisi politik yang demikian berimplikasi terhadap pola perilaku politik. Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang menggambarkan perilaku politik misalnya, penelitian di Mojokerto, Jawa Timur, menunjukkan bahwa dalam proses pemilihan, preferensi pemilih tersusun dalam *trikotomi* sebagai orientasi sosio-religius yakni santri, priyayi dan abangan.² Disamping itu juga, model analisis Karl Jackson (1978) yang melihat faktor pola hubungan antara pemimpin dan

¹ Nursal, 2004 dalam Sosiologi Politik Komtemporer, Ambo Upe, S.Sos., M.SI, Prestasi Pustaka Publisher, 2008, hlm 42-42.

² Geertz (1983)

pengikut dalam perilaku politik khususnya dalam Gerakan Darul Islam di Jawa Barat.³

Selanjutnya, hasil penelitian (Gaffar, 2000) memperkuat tipologi politik sebagaimana yang ditemukan oleh Geertz. Penelitian (Gaffar, 2000) menunjukkan bahwa orientasi sosio-religius mempunyai korelasi nyata terhadap perilaku pemilih PPP dan PDI. Santri cenderung memilih partai Islam dan kaum abangan memilih partai yang tidak membela dan memajukan Islam. Pada Pemilu 1982 responden “santri kuat” mendukung dengan kuat suatu partai Islam, sementara “abangan kuat” cenderung mendukung PDI. Begitu pula pada Pemilu tahun 1997 menunjukkan kecenderungan yang sama.⁴

Dalam menentukan pilihannya, setiap masyarakat mempunyai preferensi politik yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan keberagaman yang terdapat di Indonesia. Lain daerah lain pula preferensi masyarakatnya, apalagi dengan perkembangan teknologi yang cukup dahsyat mempermudah masyarakat mendapatkan informasi tentang calon-calon yang sedang bertanding. Preferensi politik adalah pilihan tindakan yang berdasarkan nilai-nilai yang diyakini untuk memberikan respon politik yang ada pada diri seseorang. Preferensi politik terbentuk dari banyak faktor seperti lingkungan yang mengitari individu yang berpadu dengan pengetahuan politik yang didapatkan melalui proses internalisasi nilai-nilai politik setiap waktu.

Beberapa hal yang menentukan preferensi politik pemilih diantaranya adalah; pertama memiliki ideologi yang sama dengan kandidat. Pengertian Ideologi dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan ide dan prinsip yang menjelaskan bagaimana selayaknya masyarakat bekerja dan menawarkan ringkasan masyarakat apa yang akan dibangun, diantaranya menjalankan kekuasaan dan apa yang seharusnya dilakukan. Dalam menjalankan kebijaksanaan dan perilaku, para kader atau anggota perlu ideologi sebagai pedoman dan pegangan partai. Bagi pemilih terlalu berat untuk memahami ideologi. Namun, saat ini di Indonesia, ideologi untuk para pemilih tidak menjadi hal yang menentukan untuk pilihan kandidat.

³ Mulkhan (1989), dalam Nashir (2000)

⁴ Ibid hlm 43

Persamaan ideologis sukar ditemukan oleh pemilih karena komunikasi politik antara partai dan calon anggota legislatif masih belum maksimal. Ditambah lagi adanya politik praktis yang begitu kuat. Yang kedua, penentuan pilihan pemilih berdasarkan hubungan antara kedua belah pihak (afiliasi) antara pemilih dan partai politik. Pemilih memilih suatu partai politik dengan mengabaikan siapa kandidat yang diusung karena mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan partai politik. Hal ini banyak ditemukan di masyarakat pemilih. Dalam penyampaian nama kandidat, tidak menjadi hal yang penting bagi pemilih, lambang-lambang partai lebih banyak dipajang di pelosok-pelosok daerah bahkan di tempat tinggal penduduk.

Kondisi saat ini menggambarkan bahwa hubungan masyarakat dengan partai tertentu cukup baik. Pada saat ini, sebuah partai berdasarkan fakta atau kenyataan lebih didahulukan daripada seorang kandidat. Sehingga, para calon akan mengusahakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan sebanyak mungkin support dari partai politik. Disampaikan juga bahwa kesamaan etnisitas atau unsur primordialisme lainnya, seperti kesamaan asal kelahiran menjadi alasan ketiga dari preferensi politik pemilih. Dasar preferensi politik yang ketiga ini banyak menjadi acuan bagi pilihan politik seseorang.

Pilihan yang keempat, preferensi politik pemilih berdasarkan pragmatisme politik. Adanya politik praktis disebabkan beberapa hal, seperti politik uang. Politik uang tidak selalu berupa uang yang diberikan kepada pemilih sebagai salah satu bentuk politik praktis, namun dapat berupa bantuan yang agak lebih halus supaya tidak diartikan seperti membeli suara seperti bantuan berupa bahan pokok, pembangunan rumah ibadah dan sebagainya. Politik praktis akan membentuk pemimpin yang rendah diri. Sekiranya kandidat terpilih menjadi anggota legislatif, akan terbentuk sikap mental yang rendah diri daripada lembaga eksekutif. Sehingga, kandidat yang terpilih akan merasa khawatir ketika menjalankan tugasnya sebagai anggota legislatif, dan tentunya yang terpilih memahami kekurangannya dari segi wawasan dan tingkat pendidikan. Sedangkan, fungsi lembaga legislatif ini sangat memegang peranan penting di Indonesia. Penunjukan seorang direktur utama sebuah perusahaan sampai penyusunan undang-undang diputuskan atas persetujuan dari anggota dewan.

Preferensi yang terakhir (kelima) adalah pilihan pemilih berdasarkan rencana dan kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Hal ini menjadi pertimbangan yang masuk akal bagi pemilih untuk menentukan kandidat yang akan dipilih. Akan tetapi tidak menjadi hal yang khusus untuk memutuskan pilihan, karena dianggap tidak semua memilih berdasarkan preferensi ini. Namun, kombinasi preferensi seperti yang dijelaskan sebelumnya menjadi pertimbangan pemilih untuk memutuskan memilih kandidat yang sesuai. Sepatutnya seorang pemilih yang pandai memilih berdasarkan rekam jejak kandidat, program, integritas, keahlian yang disampaikan oleh kandidat. Namun, rasa kurang optimisnya akan kondisi yang ada kedepannya yang tidak dianggap enteng bahwa apa yang dijanjikan waktu kampanye bukan sekedar isapan jempol yang membuat pemilih memilih politik pragmatis. Ditambah lagi, asumsi kandidat yang terpilih nanti tidak akan bisa merubah secara keseluruhan apa yang sudah ada.

Lima preferensi politik di atas merupakan dasar pemilih dalam menentukan pilihannya yang tidak sama dalam setiap daerah pemilihan di Indonesia, dan tentunya tidak ada yang salah jika seorang pemilih, memilih calon legislatifnya berdasarkan salah satu preferensi politik tersebut karena hal tersebut merupakan hak dan pandangan dari masing-masing pemilih. Namun akan menjadi masalah jika kemudian pemilih termanipulasi oleh pencitraan yang ditampilkan tanpa melihat rekam jejak dan kualitas calon legislatif yang akan mereka pilih. Satu hal lagi jika pemilih memang betul-betul tidak mempunyai data sedikitpun tentang calon yang akan dipilihnya namun memilih hanya berdasarkan besaran rupiah atau politik uang yang dimainkan oleh calon legislatif.

Berbagai pola yang dimainkan oleh calon legislatif agar bisa duduk menjadi wakil rakyat tidak sepenuhnya terbaca atau difahami oleh masyarakat. Hal ini disebabkan tingkat pendidikan dan pengetahuan politik masyarakat yang berbeda-beda. Selain itu, ketidakpedulian masyarakat terhadap politik di tengah kegusarannya menghadapi tuntutan ekonomi yang semakin sulit membuat sebagian masyarakat lebih memilih hanya memikirkan kehidupan ekonomi mereka dibanding memikirkan masa depan bangsa ini dengan menyalurkan hak suara mereka ke tempat pemilihan suara terdekat di lingkungannya masing-masing. Terakhir penilaian negatif masyarakat terhadap politikus-politikus yang

berhasil meraih kekuasaan saat ini, yang seolah-olah tidak betul-betul memikirkan kepentingan rakyat membuat masyarakat semakin anti membahas tentang politik, karena menurut mereka politik dan kekuasaan hanya untuk orang-orang yang punya power dan uang. Sedangkan yang tidak, senantiasa terpinggirkan.

Berbeda dengan Sumatera Barat, sebagai salah satu daerah dengan penduduk yang mayoritas muslim dan memegang teguh adat istiadat mempunyai keunikan tersendiri dalam menentukan calon legislatifnya. Masyarakat pemilih masih membutuhkan bukti yang bisa meyakinkan bahwa calon legislatif (caleg) tersebut memang mempunyai kompetensi dan berkapasitas sebagai wakil rakyat. Visi dan misi atau janji politik serta program dan harapan masyarakat di daerah pilihannya harus bisa ditangkap dan benar-benar dirasakan sebagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat dan kemudian dirumuskan secara gamblang sehingga mudah dipahami masyarakat. Berangkat dari fenomena tersebut menunjukkan belum adanya penelitian yang menyentuh aspek rasionalitas dan makna sosial dari pemberian suara sebagai bentuk implementasi dari preferensi politik masyarakat khususnya pada pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat. Oleh karena itu, penelitian ini menarik untuk dilakukan dan tergolong baru karena kontestasi pemilihannya baru akan dimulai di tahun 2024, sehingga penulis ingin meneliti lebih dalam lagi Analisis Preferensi Politik Masyarakat Sumatera Barat Terhadap Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pada Pemilu 2024.

1.2 Rumusan Masalah

Realita Masyarakat Sumatera Barat tidak bisa dilepaskan dari kontestasi politik berdasarkan nilai-nilai keislaman. Sejarah mencatat, rekam jejak elektoral politik Kota Padang lebih dekat dengan partai politik Islam dibandingkan dengan partai-partai nasionalis. Meskipun dalam perkembangannya partai nasionalis meraih suara dominan, namun basis dukungan masih dirasakan lebih besar oleh partai-partai berorientasi pemilih muslim. Tentunya, hal ini selalu menjadi salah satu tolak ukur bagi masyarakat Sumatera Barat dalam menentukan pilihannya.

Selain itu, keterbatasan pendidikan dan informasi politik juga berpengaruh pada pembentukan preferensi politik masyarakat. Misalnya, tingkat pendidikan seseorang merupakan simbol status sosial di Sumatera Barat. Pengalaman di

organisasi sosial dan politik yang ditunjang dengan pendidikan yang memadai semakin menjadikan seseorang pemilih yang rasional.

Asumsi penelitian ini adalah bahwa preferensi politik dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang ada dalam diri seseorang. Secara internal, pembentukan preferensi politik dipengaruhi oleh nilai dan keyakinan politik seseorang yang menjadi saringan bagi mereka untuk membuat pilihan politik dalam sebuah pemilihan. Tidak semua stimulus yang ada dari luar diri seseorang diterima sebagai dasar membuat keputusan politik sebelum dipertimbangkan dengan baik menggunakan nilai dan keyakinan politik yang mereka miliki. Individu akan berusaha menyesuaikan stimulus berupa informasi tersebut dengan nilai dan keyakinan politik yang ada sebelum membuat pilihan politik dalam Pemilu legislatif. Selain itu, faktor eksternal yang merupakan stimulus yang datang kepada seseorang yang ikut mempengaruhi pembuatan preferensi politik. Tentu banyak faktor yang mempengaruhi preferensi politik seseorang seperti lingkungan sosial, budaya, ekonomi dan politik di sekitar individu yang dapat menjadi pertimbangan baginya membuat pilihan politik.

Walaupun begitu, dalam proses pembuatan preferensi politik tersebut tidak semua individu berfikir rasional karena nilai-nilai subjektif juga ikut mempengaruhi individu tersebut sebagai pemilih. Jika nilai dan keyakinan mereka sejalan dengan ide dan gagasan yang disampaikan oleh calon anggota legislatif, maka mereka akan cenderung memilih apalagi kalau dikaitkan dengan kepentingan sosial, ekonomi dan budaya. Oleh karena itu, untuk mendalami lebih mendalam asumsi ini, maka penelitian ini akan memfokuskan pada pertanyaan: apa faktor yang menentukan pembentukan preferensi politik masyarakat terhadap calon anggota legislatif dalam Pemilu? Apakah implikasi faktor yang berpengaruh tersebut kepada pembentukan pilihan politik tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis preferensi politik masyarakat terhadap caleg DPR secara mendalam di Sumatera Barat. Analisis ini akan fokus pada apa saja faktor yang mendasari pilihan politik masyarakat dan bagaimana

semua faktor tersebut mempengaruhi preferensi mereka dalam memilih Caleg DPR. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan faktor pembentukan preferensi politik masyarakat terhadap calon anggota DPR dalam Pemilu legislatif.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis implikasi faktor yang berpengaruh tersebut pada pembentukan preferensi politik masyarakat terhadap calon anggota DPR dalam Pemilu legislatif.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan kontribusi dalam penelitian ini adalah:

1. Dari segi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan menambah literatur di bidang ilmu politik, menambah dan memperluas pengetahuan serta khasanah karya ilmiah serta menjadi referensi untuk penelitian berikutnya terutama dalam memahami preferensi politik masyarakat terhadap Calon Legislatif DPR dan bagaimana implikasi faktor yang berpengaruh tersebut pada pembentukan preferensi politik masyarakat dalam Pemilu legislatif.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, memperkuat representasi rakyat di DPR dan mendorong demokrasi yang lebih berkualitas di Indonesia

